

BAB III

MONOGRAFI NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN

3.1. Profil dan Sejarah Kenagarian Kototinggi Maek

3.1.1. Sejarah Nagari Maek

Sejarah yang diterima dari tokoh masyarakat tentang nama kenapa Nagari ini disebut dengan nagari maek. Konon pada masa dahulu maek berasal dari bangsa India yang melakukan perjalanan ke arah Aceh, dari Aceh mereka menuju Batang Kampar. Sampai di Batang Kampar mereka terus menyusuri aliran sungai yang mengarah ke hulu sungai. Kemudian mereka mencari suatu perkampungan untuk ditempati. Dalam perjalanan tersebut mereka mendapati sebuah sungai yang banyak ikannya, hal ini dibuktikan karena setiap benda yang dibuang kesungai selalu dimakan oleh ikan, sehingga mereka menyebut ikan tersebut dengan sebutan “Maek” dalam bahasa tamil artinya “rakus”. Perkampungan inilah yang kemudian mereka tempati yang kemudian menjadi kenagarian Maek. Dan dari mereka inilah yang kemudian membuat menhir sebagai tempat pemujaan. Konon katanya gambir tersebut sudah ada di nagari maek semenjak penjajahan Belanda dan menjadi mata pencaharian paling utama sampai sekarang (RPJM Nagari Maek 2021-2026).

Secara administrasi pada masa penjajahan Belanda sampai pada akhir tahun 70 yaitu masa pertukaran sistem pemerintahan Nagari kepada pemerintahan Desa dan awal tahun 80 an Nagari Maek dibagi menjadi 5 buah desa yaitu Desa Tigo Sakato, Desa Paruso, Desa Ronah, Desa Kototinggi dan Desa Nenan namun secara wilayah adat tetap dinamakan Maek. Pada tahun 2001 lima buah desa tersebut disatukan kembali dan dibentuklah pemerintahan Nagari Maek (RPJM Nagari Maek 2021-2026).

Tentang sejarah adat terdapat Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Adapun sejarah Rajo Adat dan Rajo Ibadat yang ada di Maek sekarang ini adalah dahulunya datang dari Batu Sangkar yang mengutus dua buah raja di Maek yaitu Raja Adat dengan gelar Dt. Bandara atau Dt. Inyiak, sedangkan Rajo Ibadat dengan gelar Dt. Rajo Dirajo. Dari 2 orang Rajo ini membawahi 6 Pucuk

Suku/Koto yakni Suku Piliang, Suku Melayu, Suku Domo, Suku Mandahiliang, Suku Pitopang dan Suku Kampai.

3.1.2. Aspek Geografis

Nagari Maek termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukik Barisan, dan memiliki dua belas jorong. Wilayahnya terletak pada 60 – 110 Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 500 meter dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 300 C. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan 18 km, dari Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45 km, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat 170 km. luas nagari Maek 12.206 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Nagari Koto Iamo/ Kec. Kapur IX.
2. Sebelah selatan dengan Nagari Banja Loweh,
3. Sebelah barat Berbatasan dengan Rao Mapat Tunggal Kec. Pasaman,
4. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Talang Maur / Kec. Mungka.

Bentuk permukaan Nagari Maek merupakan daerah perbukitan dan daratan yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Nagari Maek dibagi atas kemiringan 8-15%, kemiringan 15-30%, kemiringan 30-45% dan kemiringan >45%. Dengan tingkat ketinggian 617 diatas permukaan laut. Mengenai kondisi topografi pada kenagarian Maek dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Topografi Nagari Maek

No.	Kemiringan	Kondisi	Luas (ha)	%
1.	8-15 %	Landai	2.117,1	32
2.	15-30 %	Agak curam	858,95	13
3.	30-45 %	Curam	2579,45	39
4.	<45 %	Sangat curam	1058,20	16
		Jumlah		100

Sumber: RPJM Nagari Maek 2021-2026.

Daerah Maek merupakan tipe A (Achmidt Ferguson), dengan curah hujan 3870 mm/tahun. Jumlah bulan basah 10 bulan/tahun dengan 2 bulan kering

pertahun. Daerah ini mempunyai awal musim hujan pada bulan Agustus. Keadaan iklim pada Nagari Maek beriklim tropis, dimana suhu udara pada kawasan ini berkisar antara 32°C dengan curah hujan 14, 93 mm/hari. Ditinjau dari segi hidrologinya secara umum sistem air pada Nagari Maek ini dapat dibedakan atas dua, yaitu:

b Air permukaan

Air permukaan ini berupa aliran sungai yang mengalir dalam Nagari Maek yakni sungai Batang Maek dan Sungai Sinamar. Sungai ini dijadikan sebagai akhir dari pembuangan air limbah masyarakat dari saluran drainase sekunder yang ada dalam lingkungan penduduk baik perumahan maupun pemukiman. Disamping itu juga dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sebagian kecil masyarakat Nagari Maek dan juga untuk keperluan pertanian.

b. Air tanah

Mengenai air tanah ini, biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran. Nagari Maek lebih dominan dengan sumber air yang melimpah, jadi masyarakat tidak begitu kesusahan dalam mengairi sawah atau irigasi. Nagari Maek berdasarkan administrasinya pemerintahannya memiliki dua belas jorong, yaitu:

Tabel 3.2
Nama-Nama Jorong Nagari Maek

No.	Jorong
1.	Koto gadang
2.	Sopan tanah
3.	Bunga tanjong
4.	Aur duri
5.	Ampang gadang 1
6.	Ampang gadang 2
7.	Ronah
8.	Kototinggi 1

9.	Kototinggi 2
10.	Kototinggi 3
11.	Sopan Gadang
12.	Nenan

Sumber: RPJM Nagari Maek 2021-2026

Nagari Maek terdapat dua belas jorong yang pusat pemerintahan di nagari ronah yang berada di tengah-tengah Nagari Maek, hal ini yang memunculkan untuk inisiasi Nagari Kototinggi I, Kototinggi II dan Kototinggi III untuk melakukan pemekaran. Hal ini dilakukan untuk menimalisir tenggang jarak dan waktu dalam urusan di Nagari Maek.

3.1.3. Aspek Demografi

Nagari Maek dihuni oleh 9.274 jiwa, yang terdiri dari 4.511 laki-laki dan 4.763 perempuan. Semuanya terhimpun dalam 2.702 KK. Pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk Maek merupakan 25,7% petani/ peternak, 1% pedagang, 0,9% PNS, 0,5% pensiunan, 9,6% pengrajin dan sisanya adalah pelajar/mahasiswa dan pengangguran. Perincian yang jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Klasifikasi Penduduk Nagari Maek

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	4.511 Orang	48,5%
2.	Perempuan	4.763 Orang	51,5%
	Jumlah	9.274 Orang	100%

Sumber RPJM Nagari Maek 2021-2026

a. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat

1. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam masyarakat, melalui pendidikan individu dapat dapat mengembangkan potensi diri di lingkungan masyarakat seperti keagamaan, politik, dan

keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam komunitas. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam menciptakan kesadaran sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat.

Melalui pendidikan individu belajar untuk menghargai perbedaan, memahami isi-isu sosial, dan berkontribusi pada solusi yang konstruktif. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan juga sangat penting, karena kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dengan demikian pendidikan menjadi alat yang ampuh untuk memajukan pola pikir masyarakat dalam membangun masa depan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena pendidikan merupakan suatu sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan itu dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas atau sarana pendidikan adapun sarana atau fasilitas pendidikan di nagari maek sudah dikatakan baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.4
Sarana Pendidikan Di Nagari Maek

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TK	12
2.	SD	11
3.	SMP	2
4.	SLB	1
5.	SMA	1
6.	MDA	10
	Jumlah	37

Sumber RPJM Nagari Maek 2021-2026

Melihat tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana ataupun fasilitas di Nagari Maek sudah bisa dikatakan baik karena sarana dan prasarana sudah memadai.

2. Kehidupan Beragama

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari peninjauan di Nagari Maek, bahwa seluruh masyarakat yang ada di Nagari Maek merupakan beragama Islam. Dalam memperoleh ilmu agama mereka belajar kepada ulama-ulama setempat yang dianggap mampu mengajarkan ilmu agama. Sarana peribadahan yang ada di nagari maek telah memadai, karena masjid, dan mushalla sudah ada setiap jorong sehingga persebarannya cukup baik dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Mereka juga sering sholat berjamaah di masjid dan mushalla, disamping untuk tempat ibadah mereka juga mengadakan wirid yasinan setiap hari jumat. Wirid yasin juga dia adakan secara bergiliran dari rumah ke rumah.

TABEL 3.5
JUMLAH SARANA IBADAH DI NAGARI MAEK

NO.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Persentase
1.	Mesjid	14 unit	48,3%
2.	Mushalla	15 unit	51,7%
	Jumlah	29 unit	100%

Sumber RPJM Nagari Maek 2021-2026

Tabel diatas merupakan sarana peribadahan nagari maek sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya masjid dan mushalla yang telah ada setiap jorong yang ada di nagari maek.

3.1.4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat terbentuk dari hubungan suatu individu dengan individu lainnya, atau dengan kelompok yang satu dengan yang lainnya. Sementara itu setiap pergaulan sosial masyarakat diatur atau berpedoman pada norma-norma dalam masyarakat disebut system nilai. Sistem nilai inilah yang dipakai

dalam masyarakat untuk mengatur lalu lintas pergaulan sosial, baik secara vertical maupun horizontal. Karena itulah adanya hubungan balas membalas sesama masyarakat.

Masyarakat nagari maek dalam sistem sosial mereka terdapat kebersamaan sosial yang begitu rupa, sehingga satu sama lainnya saling mengawasi dan saling tolong menolong jika ada yang tertimpa musibah. Masyarakat nagari maek memiliki solidaritas yang tinggi, jika ada keperluan individu maupun kelompok biasanya mereka bergotong royong, jadi tidak heran masyarakat seperti keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan ekonomi, masyarakat nagari maek melakukan berbagai macam usaha, antara lain bertani, baik itu petani gambir, karet, pinang, kelapa, kakao dan lainnya. Selain sebagai petani ada juga pekerja sebagai pedagang, PNS, pegawai swasta TNI/Polri, tukang, bidan, pengrajin, namun yang menjadi mata pencarian utama masyarakat nagari maek adalah bertani.

1. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan ciri khas dalam suatu masyarakat, karena adat istiadat tersebut suatu masyarakat akan dikenal, dan dari adat istiadat seseorang akan diketahui dari mana asalnya, adat istiadat memberikan sudut pandang baru pada masyarakat dengan hal mengatur tatanan dan aturan yang ada di masyarakat. Nagari Maek kecamatan Lima Puluh Kota masih memegang teguh adat istiadat, Selain dengan wali nagari, mereka masih memakai ninik mamak dalam membantu penyelesaian perkarayang terjadi pada masyarakat.

Ninik mamak adalah orang dituakan di nagari maek didahulukan selangkah ditinggikan serantiang. Ninik mamak ditunjuk oleh masyarakat untuk diminta pendapat ketika ada masalah dalam masyarakat.

3.2. Alasan Pemekaran Nagari Kototinggi Maek

3.2.1. Peningkatan Pelayanan Publik

Reformasi dan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mana salah satu dimensi keberhasilannya

dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan hal krusial yang tidak bisa ditawar-tawar lagi saat ini. Hal ini sejalan dengan menguatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan responsif dan efisien. Salah satu prinsip *Reinventing Government*, pemerintah diharuskan berorientasi pada pelanggan (*Customer Driven Government*) yang berarti menempatkan pelanggan (masyarakat) pada urutan yang paling depan. Oleh karena itu, kepuasan masyarakat sebagai pelanggan ditempatkan sebagai sasaran pencapaian tujuan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat (Dwimawanti 2004, 109).

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara tertentu (Rohayatin 2017, 25).

Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintahan melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik.

Ada tiga alasan penting melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong praktik *good governance* di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders*, yaitu pemerintah, warga, dan sektor usaha. Kedua, pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur *governance*. Melakukan interaksi yang sangat intensif, ketiga nilai-nilai yang selama ini mencirikan secara lebih mudah dan nyata melalui pelayanan publik (Riska 2022, 79-80).

Berdasarkan hal di atas penulis simpulkan bahwa dengan peningkatan pelayanan publik diharapkan pelayanan kepada lebih optimal dan lebih dekat, dengan itu sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan lebih baik.

3.2.2. Pengelolaan Sumber daya

Pembangunan manusia seutuhnya merupakan cita-cita bangsa. Sumber daya manusia adalah modal dasar pembangunan yang terdiri atas dimensi kuantitatif yaitu jumlah dan struktur penduduk, serta dimensi kualitatif yaitu mutu hidup penduduk. Selain itu sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan suatu pembangunan guna memperlancar pencapaian sasaran pembangunan nasional antara lain kualitas manusia dan masyarakat Indonesia serta disiplin nasional yang mewujudkan kepatuhan kepada hukum Negara dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, baik secara tenaga penggerak atau pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sumber daya manusia sebagai inti pembangunan merupakan salah satu input (factor) yang menentukan keberhasilan pembangunan, maupun secara output atau yang ingin dihasilkan dari proses pembangunan. Dengan demikian sumber daya manusia sebagai komponen pendidikan yang dianggap menjadi kunci keberhasilan pendidikan harus dibina dan dikembangkan secara kontinew sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas mampu melaksanakan fungsinya secara professional (Abdu 2020, 23-24).

Pengelolaan sumber daya sangatlah penting terkait dengan bagaimana mengelola, mengatur dan memanfaatkan sumber daya dapat berfungsi secara produktif. Tujuan pengelolaan sumber daya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Tujuan yang lain adalah untuk mengembangkan program-program dalam rangka menimalisir penyimpangan atas dasar kepentingan individu dan organisasi (Endang 2019, 55-63).

3.2.3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan sebagai salah satu factor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Latif Adam 2019, 1-2).

3.2.4. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mepercepat proses pembangunan, infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Ini dikarenakan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Infrastruktur memiliki posisi amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh penyediaan jaringan jalan, air bersih, pembungan sampah, drainase, dan sanitasi maka dapat mendorong peningkatan intensitas dan kualitas kesejahteraan masyarakat (Wahyono 2006, 113).

3.3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021

3.3.1. Latar Belakang Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021

Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud langkah strategis diambil oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik di masyarakat. Dalam

konteks ini, pemekaran bertujuan untuk mendekatkan wadah layanan kepada masyarakat lebih dekat serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan yang ada setiap daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memberikan ruang daerah untuk mengurus rumah tangga pemerintahan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran nagari merupakan suatu hal menjanjikan berbagai mamfaat, terdapat masyarakat seperti meningkatnya partisipatif masyarakat, dan lebih terjangkau jarak tempuh, dan meningkatkan infrastruktur di nagari. Berikut proses pemekaran Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai dengan prakarsa pemekaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.7
MATRIKS PROSES PEMEKARAN NAGARI KOTOTINGGI MAEK

No.	Tanggal & Tempat	Orang yang terlibat	Hasil	Keterangan
1.	12 Juni 2013 Masjid Nurul Yakin Kototinggi Maek	• Ketiga Kepala Jorong • Kaompek Suku Kototinggi • Anggota Bamus Perwakilan Tiga Jorong • Ketua pemuda tiga jorong	Mengajukan Kototinggi menjadi sebuah nagari Kototinggi maek	Pemrakarsa Kepala jorong Kototinggi I,II, & III
2.	14 Juni 2013 Masjid Nurul Yakin Kototinggi Maek	• Ketiga kepala jorong • Ninik mamak se-	Suara bulat mengajukan Kototinggi menjadi sebuah nagari	Rapat dipimpin oleh : kepala jorong Kototinggi I

		Kototinggi maek		
3.	19 Juni 2013 Masjid Nurul Yakin Kototinggi Maek	• Ketiga kepala jorong • Kaompek suku Kototinggi • Anggota bagus perwakilan tiga jorong • Pemuka masyarakat • Ketua pemuda tiga jorong • Seluruh ninik mamak	Membentuk panitia pembentukan nagari Kototinggi maek	Panitia pembentukan selanjutnya mempunyai tugas untuk menyusun proposal usulan pembentukan nagari kepada bupati lima puluh kota
4.	10 April 2014	Bapa bupati kabupaten lima puluh kota Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo	Diterbitkannya SK Nomor 149 Tahun 2014, maka jadilah kototinggi sebagai nagari binaan/Persiapan.	

Berdasarkan data yang dimuat di matriks di atas dapat disimpulkan bahwa pemekaran nagari yang dilakukan nagari Kototinggi telah dilakukan sejak 2013 dengan proses yang lama masyarakat berharap agar terelisasi namun hal pada tahun 2021 pemekaran nagari Kototinggi Maek dicabut. Sedangkan dari manfaat pemekaran wilayah sangat berdampak baik bagi pelayanan dan partisipasi masyarakat

3.3.2. Isi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pembentukan Nagari Persiapan Kototinggi Maek di Kecamatan Bukik Barisan. Peraturan ini mencerminkan perubahan dalam struktur

pemerintahan nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya dalam pengelolaan dan administrasi nagari.

Dalam Pasal 1, Peraturan Bupati ini memberikan definisi penting yang menjadi landasan bagi pemahaman mengenai istilah-istilah yang digunakan. Di antaranya, "Daerah" merujuk pada Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan "Pemerintahan Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Istilah "Nagari" dijelaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, diatur pula mengenai Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari dan Penduduk di nagari yang terdiri dari Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di nagari

Pasal 2 dari peraturan ini menegaskan bahwa Nagari Persiapan Kototinggi Maek dihapus sebagai Nagari Persiapan dan dikembalikan ke Nagari Induk, yaitu Nagari Maek. Langkah ini menunjukkan upaya untuk menyederhanakan struktur pemerintahan nagari dan mengembalikan fungsi serta peran Nagari Maek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang lebih kuat.

Pada Pasal 3, dinyatakan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Nomor 457 Tahun 2017 tentang pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan Kototinggi Maek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menandakan bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan Nagari Persiapan Kototinggi Maek tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Pasal 4 menetapkan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui perubahan ini, peraturan ini akan diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota